



Profesionalisme Penegakan Hukum oleh Kepolisian Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Publik

Dessy Dara Lampabe, S.Si., S.I.K

Sespim Lemdiklat Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah

Riwayat artikel:

Diterima 05/09/2025

Direvisi 05/09/2025

Disetujui 05/09/2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas profesionalisme penegakan hukum oleh kepolisian dalam kaitannya dengan upaya membangun kepercayaan publik. Profesionalisme dipandang sebagai fondasi penting yang menentukan legitimasi kepolisian di mata masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara integritas, akuntabilitas, dan konsistensi aparatur dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, pelatihan yang belum merata, serta potensi diskriminasi menjadi kendala utama dalam penerapan profesionalisme. Namun demikian, penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel, digitalisasi layanan, dan pengawasan internal yang ketat. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Profesionalisme, Penegakan Hukum, Kepolisian, Kepercayaan Publik

PENDAHULUAN

Profesionalisme penegakan hukum oleh kepolisian merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pola kepolisian di berbagai negara menunjukkan keterkaitan erat antara legitimasi hukum dengan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya profesionalisme, praktik penegakan hukum berpotensi menghadapi tantangan berupa ketidakpercayaan, resistensi sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan [1].

Profesionalisme kepolisian sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan, pembentukan etos kerja, serta penguatan integritas dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi pilar penting agar aparat mampu menjalankan tugas dengan konsisten, adil, dan bebas dari praktik diskriminatif. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku aparat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap perlakuan tidak adil [5].

Praktik kepolisian yang baik ditandai dengan adanya kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam ruang lingkup Polri, profesionalisme tercermin melalui penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat luas [4]. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum dapat memperkuat kepercayaan publik, serta menjadi rujukan peningkatan kualitas kinerja kepolisian masa depan [2].

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara profesionalisme kepolisian dan kepercayaan publik.

2. Sumber Data

Data diperoleh melalui studi literatur tentang profesionalisme dan praktik kepolisian dan dokumen internal kepolisian mengenai standar pelayanan publik.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis tematik untuk menemukan pola hubungan antara profesionalisme dan kepercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profesionalisme sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Profesionalisme kepolisian yang ditunjukkan melalui integritas, akuntabilitas, dan konsistensi menjadi dasar utama kepercayaan masyarakat. Pola kepolisian yang adil dan berorientasi pada kepastian hukum terbukti memperkuat legitimasi serta partisipasi publik [1].

2. Hambatan dalam Menegakkan Profesionalisme

Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, kualitas pelatihan yang belum merata, serta adanya potensi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat dan melemahkan tingkat kepercayaan publik [3].

3. Upaya Penguatan Profesionalisme Kepolisian

Penguatan profesionalisme dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel, penerapan standar pelayanan yang adil, serta digitalisasi untuk transparansi. Pengawasan internal yang ketat juga penting agar setiap tindakan aparat selaras dengan nilai integritas dan hak asasi manusia [5].

KESIMPULAN

Profesionalisme kepolisian melalui integritas, akuntabilitas, dan pelayanan yang konsisten menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, sehingga meski ada kendala sumber daya dan pelatihan, penguatan dapat ditempuh dengan peningkatan kapasitas, digitalisasi layanan, dan pengawasan internal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bayley, D. H. (1990). *Patterns of policing: A comparative international analysis*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- [2] Bayley, D. H. (1994). *Police and society*. New York: Oxford University Press.
- [3] Bayley, D. H., & Mendelsohn, H. (1969). *Minorities and the police: Confrontation in America*. New York: Free Press.
- [4] Den Boer, M., Pyo, C., & others. (2008). *Good policing: Instruments, models and practices*. The Hague: Eleven International Publishing.
- [5] Fielding, N. G. (1988). *Professionalizing the police: The unfulfilled promise of police training*. Buckingham: Open University Press.